

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Penelitian Terdahulu

Penelitian laporan tahunan sering dilakukan penelitian, terutama dalam pengungkapan *corporate governance*. Data yang digunakan dalam penelitian terdahulu banyak yang terbatas pada data pengamatan yang kurang panjang.

Rini (2010) menganalisis mengenai luas pengungkapan *corporate governance* terhadap besaran perusahaan, umur listing perusahaan, kepemilikan dispersi, perusahaan multinasional, dan ukuran dewan komisaris. Metode penelitian yang digunakan adalah regresi berganda. Hasil Penelitian menunjukkan variabel independen yang berpengaruh secara signifikan terhadap luas pengungkapan *corporate governance* adalah besaran perusahaan. Akan tetapi, umur listing perusahaan, kepemilikan dispersi, perusahaan multinasional, dan ukuran dewan komisaris tidak menunjukkan pengaruh terhadap luas pengungkapan *corporate governance*.

Natalia (2012) menganalisis luas pengungkapan *corporate governance* pada laporan keuangan perusahaan LQ45 terhadap independensi komite audit, klasifikasi industri ukuran perusahaan, *profitabilitas*, dan *leverage*. Metode penelitian yang digunakan adalah dengan menggunakan metode regresi berganda. Hasil penelitiannya menunjukkan variabel independen yang berpengaruh secara signifikan terhadap pengungkapan *corporate governance* adalah independensi

komite audit dan klasifikasi industri. Akan tetapi, ukuran perusahaan, *profitabilitas*, dan *leverage* tidak menunjukkan pengaruh signifikan terhadap pengungkapan *corporate governance*.

Putranto (2013) menganalisis luas pengungkapan *corporate governance* pada perbankan terhadap Kepemilikan Dispersi, ukuran dewan komisaris ukuran perusahaan, *profitabilitas*, dan kualitas audit. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan Kepemilikan Dispersi dan ukuran dewan komisaris berpengaruh positif dan signifikan terhadap luas pengungkapan *corporate governance*. Sedangkan ukuran perusahaan, *profitabilitas*, dan kualitas audit tidak berpengaruh signifikan terhadap luas pengungkapan *corporate governance*.

Tabel 2.1
Ringkasan penelitian terdahulu

Peneliti	Judul	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
Amelia Kartika Sari (2010)	Analisis Luas Pengungkapan <i>Corporate Governance</i> Dalam Laporan Tahunan Perusahaan Publik Di Indonesia	Regresi berganda	Variabel independen yang berpengaruh secara signifikan terhadap luas pengungkapan <i>corporate governance</i> adalah besaran perusahaan. Akan tetapi, umur listing perusahaan, kepemilikan dispersi, perusahaan multinasional, dan ukuran dewan komisaris tidak menunjukkan pengaruh terhadap luas pengungkapan <i>corporate governance</i> .

Perti Natalia (2012)	Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pengungkapan <i>Corporate Governance</i> Pada Laporan Keuangan Pada LQ-45	Regresi berganda	Variabel independen yang berpengaruh secara signifikan terhadap pengungkapan <i>corporate governance</i> adalah independensi komite audit dan klasifikasi industri. Akan tetapi, ukuran perusahaan, <i>profitabilitas</i> , dan <i>leverage</i> tidak menunjukkan pengaruh signifikan terhadap pengungkapan <i>corporate governance</i> .
Rianto Jati Putranto (2013)	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Luas Pengungkapan <i>Corporate Governance</i> Dalam Laporan Tahunan Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2008 – 2011	Regresi berganda	Kepemilikan Dispersi dan ukuran dewan komisaris berpengaruh positif dan signifikan terhadap luas pengungkapan <i>corporate governance</i> . Sedangkan ukuran perusahaan, <i>profitabilitas</i> , dan kualitas audit tidak berpengaruh signifikan terhadap luas pengungkapan <i>corporate governance</i> .
Ahmad Nurkhin (2009)	<i>Corporate Governance</i> Dan <i>Profitabilitas</i> ; Pengaruhnya Terhadap Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Studi Empiris Pada Perusahaan Yang Tercatat Di Bursa Efek Indonesia	Analisis deskriptif dan analisis statistik.	Kepemilikan institusional tidak terbukti berpengaruh terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Sementara komposisi dewan komisaris independen dan <i>profitabilitas</i> terbukti secara signifikan berpengaruh positif
Reny Dyah Retno (2012)	Pengaruh <i>Good Corporate Governance</i> Dan Pengungkapan	Regresi berganda	GCG berpengaruh positif terhadap Nilai Perusahaan dengan variabel kontrol <i>Size</i> dan <i>Leverage</i> pada

	<p><i>Corporate Social Responsibility Terhadap Nilai Perusahaan Studi Empiris Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2007-2010</i></p>		<p>perusahaan yang terdaftar di BEI periode 2007-2010. Pengungkapan CSR berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Nilai Perusahaan dengan variabel kontrol <i>Size</i>, Jenis industri, <i>Profitabilitas</i>, dan <i>Leverage</i> pada perusahaan yang terdaftar di BEI periode 2007-2010. GCG dan Pengungkapan CSR berpengaruh positif terhadap Nilai Perusahaan pada perusahaan yang terdaftar di BEI periode 2007-2010</p>
--	--	--	--

Sumber: Data diolah penulis, 2014

Penelitian kali ini kembali menguji luas pengungkapan corporate governance pada laporan tahunan perusahaan manufaktur. Faktor yang digunakan dalam penelitian kali ini adalah ukuran perusahaan, *profitabilitas*, ukuran dewan komisaris, dan *leverage* terhadap luas pengungkapan *corporate governance*. Peneliti akan menggunakan data yang panjang yakni 5 periode dari tahun 2008-2012. Hal tersebut dilakukan untuk menguji variabel yang ditentukan apakah tetap stabil hasil penelitian sekarang dengan penelitian yang terdahulu dengan masa yang lebih panjang. Perusahaan manufaktur yang menerbitkan laporan tahunan dipilih sebagai objek penelitian karena perusahaan manufaktur dinilai sebagai perusahaan yang banyak berhubungan dengan masyarakat luas, baik dalam proses produksi maupun dalam proses pemasaran. Selain itu, penelitian luas

pengungkapan jarang dilakukan pada perusahaan manufaktur. Sehingga penulis merasa perlu dilakukan penelitian terhadap perusahaan manufaktur.

2.2. Kajian Teori

2.2.1. Teori Agensi (*agency theory*)

Menurut Natalia (2012:11), *corporate governance* dapat dipandang dari *agency perspective*. Teori keagenan merupakan dasar yang digunakan perusahaan untuk memahami *corporate governance* (Rini, 2010:18). Inti dari hubungan keagenan adalah adanya pemisahan kepemilikan (*principal/investor*) dan pengendalian (*agent/manager*). Menurut Brigham & Houston (2006: 26-31) para manajer diberi kekuasaan oleh pemilik perusahaan, yaitu pemegang saham, untuk membuat keputusan, dimana hal ini menciptakan potensi konflik kepentingan yang dikenal sebagai teori keagenan (*agency theory*). Menurut Jensen dan Meckling (1976) dalam Natalia (2012:12) teori keagenan di definisikan sebagai berikut:

“A contract under which one or more persons (the principal/s) engage another person (the agent) to perform some service on their behalf which involve delegating some decisions making authority to the agent.”

Pemegang saham/investor mendelegasikan kewenangan kepada *agent/manajer* untuk mengelola sumber daya yang dimiliki investor secara maksimal. Investor mempunyai harapan bahwa dengan mendelegasikan wewenang pengelolaan tersebut, *agent/manajer* dapat memberikan keuntungan bagi investor baik dalam jangka waktu pendek maupun dalam jangka panjang. Hal ini yang menjadi dasar penting untuk melaporkan dan pengungkapan tentang

perusahaan kepada investor sebagai wujud akuntabilitas manajemen terhadap pemilik.

Teori keagenan mengasumsikan bahwa masing-masing individu cenderung untuk mementingkan diri sendiri. Rini, (2010:18) Manajer perusahaan kemungkinan memiliki tujuan pribadi yang berbeda dengan tujuan dari investor yakni untuk memberikan keuntungan atau kekayaan kepada investor. Kewenangan mengelola sumber daya yang dimiliki investor tidak berjalan sesuai keinginan investor. Hal tersebut akan menimbulkan konflik kepentingan antara manajer dan investor. Teori keagenan mengasumsikan, dalam pasar modal dan tenaga kerja yang tidak sempurna, manajer akan berusaha untuk memaksimalkan *utilitas* mereka sendiri, dengan mengorbankan kepentingan para pemegang saham (Hikmah, 2011)

Menurut Eisenhardt, dikutip oleh Warsono, dkk, (2009) dalam Natalia (2012:12), teori keagenan menggunakan 3 asumsi sifat manusia, yaitu:

1. Manusia pada umumnya mementingkan diri sendiri (*self interest*).
2. Manusia memiliki daya pikir terbatas mengenai persepsi masa mendatang (*bounded rationality*).
3. Manusia selalu menghindari resiko (*risk averse*).

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa manusia pada dasarnya lebih mementingkan diri mereka sendiri dari pada lingkungan sekitar. Seperti halnya manajer yang lebih mementingkan pada tujuan-tujuan pribadinya dari pada tujuan untuk memakmurkan investor yang memiliki sumber daya. Misalnya tindakan untuk memperoleh bonus yang besar dengan menginvestasikan

pada kegiatan-kegiatan dengan laba tinggi dalam jangka pendek dari pada memaksimalkan investasi pada jangka panjang untuk kelangsungan perusahaan.

Terdapat sejumlah cara untuk menyelaraskan kepentingan pemegang saham (*principal*) dengan manajer (*agent*), salah satunya adalah dengan melakukan penerapan dan pengungkapan terkait isu *corporate governance*. Menurut Warsono et al., (2009) dalam Natalia (2012:13) dengan penerapan *corporate governance*, diharapkan perusahaan (*agent*) dapat melaksanakan tanggung jawab terhadap semua pemangku kepentingan, termasuk pemegang saham sebagai *principal*, sehingga konflik kepentingan antara *agent* dan *principal* dapat diminimalkan. Dalam menanggulangi masalah asimetri ini, diharapkan perusahaan dapat mengungkapkan dan mengimplementasikan *corporate governance* dengan baik dan benar demi membuktikan komitmen perusahaan terhadap pemangku kepentingan sehingga dapat mengurangi resiko yang terburuk, yaitu kebangkrutan perusahaan.

2.2.2. Corporate Governance

Corporate Governance terdiri dari dua kata, yakni *corporate* dan *governance*. Kata *corporate* berarti berbagai sifat yang berkaitan dengan korporasi atau perusahaan. Sedangkan kata *governance* berarti pengelolaan, jadi *corporate governance* dapat diartikan sebagai tata kelola perusahaan. (Warsono, at al, 2009)

Forum for Corporate Governance (FCGI) dalam penelitian Reny dan Denies (2012) menyebutkan dalam publikasi yang pertamanya, FCGI menggunakan definisi *Cadbury Committee* tahun 1992, yaitu:

"seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka, atau dengan kata lain suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan”.

Berdasarkan pengertian dari FCGI terlihat bahwa akan timbul hak dan kewajiban diantara pihak internal perusahaan dengan pihak eksternal perusahaan sehingga *corporate governance* menjelaskan distribusi hak dan kewajiban dari masing-masing pihak yang berkepentingan dalam perusahaan.

Malaysian High Level Finance Committee on Corporate Governance dalam penelitian Rini (2010:15) mendefinisikan *corporate governance* sebagai suatu proses dan struktur yang digunakan untuk mengarahkan dan mengelola bisnis dan urusan-urusan perusahaan dalam rangka meningkatkan kemakmuran bisnis dan akuntabilitas perusahaan dengan tujuan utama mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan pihak-pihak lain. Menurut *Forum for Corporate Governance in Indonesia* (FCGI) mendefinisikan CG sebagai seperangkat peraturan yang menetapkan hubungan antara pemangku kepentingan, pengurus, pihak kreditur, pemerintah, karyawan, serta para pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya.

Konsep *corporate governance* secara umum memiliki hubungan erat dengan ajaran agama. Prinsip *corporate governance* selaras dengan ajaran-ajaran dalam agama Islam. Islam selalu mengajarkan etika yang baik, moral yang kuat, integritas, serta kejujuran. Ajaran-ajaran tersebut yang dicoba diterapkan dalam

implementasi *corporate governance*. Pada sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Aisyah r.a. yang artinya

“Sesungguhnya Allah menyukai apabila seseorang melakukan sesuatu pekerjaan dilakukan dengan baik”

Corporate governance dalam Islam memiliki fitur unik dan menyajikan karakteristik khas dibandingkan dengan konsep barat Anglo-Saxon dan model Eropa. Ini menggabungkan unsur Tauhid, Syura, aturan syariah dan memelihara tujuan pribadi tanpa mengabaikan tugas sosial kesejahteraan. Islam juga percaya bahwa kegiatan sehari-hari seseorang dan transaksi perusahaan harus didasarkan pada nilai-nilai kejujuran, ketegasan, rasa hormat, keadilan, toleransi, kesabaran, dan kejujuran, bukan kebohongan, keangkuhan, pembangkangan, iri, dengki, fitnah dan membesarkan diri (MK Hassan, 2002). Hal itu juga harus diwujudkan dalam keterlibatan individu pada kegiatan usaha dan operasi serta hubungan mereka dengan semua stakeholder masing-masing. Secara keseluruhan, pandangan Islam tentang tata kelola perusahaan lebih komprehensif dari pada pandangan stakeholder dan erat kaitannya dengan nilai-nilai etika dalam Islam.

2.2.3. Prinsip-prinsip *Corporate Governance*

Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) mengembangkan 5 prinsip *good corporate governance*, yaitu:

1. Perlindungan terhadap hak-hak pemegang saham.
2. Persamaan perlakuan terhadap seluruh pemegang saham termasuk pemegang saham asing dan minoritas.
3. Peranan pemangku kepentingan yang terkait dengan perusahaan.

4. Keterbukaan dan transparansi.
5. Akuntabilitas dewan komisaris.

Sedangkan di Indonesia, KNKG tahun 2006 menetapkan 5 prinsip *corporate governance* yang tercantum dalam “Pedoman Umum *Good Corporate Governance*”, yaitu:

1. Transparansi.

Transparansi dapat diartikan sebagai keterbukaan informasi, baik dalam pengambilan keputusan maupun pengungkapan informasi. Transparansi merupakan hal yang penting dalam pengelolaan perusahaan. Penyediaan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan sangat diperlukan untuk menciptakan transparansi di perusahaan. Perusahaan harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang diisyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur, dan pemangku kepentingan lainnya. Berdasarkan pengertian di atas, dalam Islam di jelaskan dalam ayat Al-qur'an surat Al-Baqarah ayat 282

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى

فَاكْتُبُوهُ ۖ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۗ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ

يَكْتُبْ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۖ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ

وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۖ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya.” (QS. Al-Baqarah, 282)

2. Akuntabilitas.

Perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu perusahaan harus dikelola dengan benar, terukur, dan sesuai dengan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lain.

Akuntabilitas dalam Islam tidak hanya terbatas pada tanggung jawab kinerja secara transparan dan wajar, tetapi lebih mengutamakan esensi hidup manusia dalam mempertanggungjawabkan perbuatannya kepada Allah SWT. Seluruh penciptaan di dunia ini diciptakan untuk manusia dan untuk dikelola dengan baik guna kemaslahatan manusia.

3. Responsibility.

Perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan

sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapatkan pengakuan sebagai *good corporate citizen*.

Pandangan Islam terhadap responsibility atau pertanggung jawaban sangat jelas, hal tersebut diterangkan dalam Al-qura'an sebagai berikut:

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمْنَتِكُمْ وَأَنْتُمْ

تَعْلَمُونَ

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui*”. (QS. Al-Anfaal, 27)

Potongan ayat di atas, Allah SWT memerintahkan orang Islam untuk benar-benar menjaga amanat yang telah diperoleh. Aplikasi dalam Penerapan corporate governance di perusahaan mengharuskan bertanggung jawab terutama pada pemilik modal. Hal tersebut dilakukan seolah-olah untuk menjaga amanat pemilik modal dan pihak-pihak yang berkepentingan lainnya yang telah memberikan modal kepada manajemen untuk dikelola. Islam juga memberikan larangan untuk berkhianat kepada amanah yang telah diberikan, sehingga terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang perusahaan.

4. Independensi.

Perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak diintervensi oleh pihak lain.

Pandangan Islam terhadap independensi yang dimaksud adalah terkait dengan sikap konsisten atau istiqamah yaitu tetap berpegang teguh pada kebenaran meskipun harus menghadapi risiko. Independensi merupakan karakter manusia yang bijak yang dalam Al-Qur'an disebutkan sebanyak 16 kali. Surat Fushilat ayat 30 menerangkan tentang independensi sebagai berikut:

إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ ﴿٣٠﴾

Artinya “*Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan: "Tuhan Kami ialah Allah" kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, Maka Malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan: "Janganlah kamu takut dan janganlah merasa sedih; dan gembirakanlah mereka dengan jannah yang telah dijanjikan Allah kepadamu".* (QS Fushilat 30)

5. Kewajaran dan kesetaraan.

Perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan.

Kesetaraan dan kewajaran dimaksudkan untuk menghadirkan pengelolaan perusahaan yang adil bagi setiap pihak. Jika dikaitkan dengan syariah, maka keadilan tersebut harus mencakup aspek spiritual dan material. Maka makna adil dapat diperluas pada setiap prinsip yang terdapat dalam *Corporate Governance* maupun nilai-nilai lain yang dapat

dimunculkan atas implementasi keadilan. Al-Qur'an menjelaskan dalam surat berikut:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ

النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ

سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: “*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat*”. (QS An-Nisaa’ 58)

Prinsip-prinsip GCG di atas sebaiknya diimbangi dengan *Good Faith* (bertindak atas itikad baik) dan kode etik perusahaan serta pedoman *corporate governance*, agar visi dan misi perusahaan dapat terwujud. Pedoman *corporate governance* yang telah dibuat hendaknya dijadikan kode etik perusahaan yang dapat memberikan acuan pada pelaku usaha untuk melaksanakan GCG secara konsisten dan konsekuen. Hal ini penting karena mengingat kecenderungan aktifitas usaha yang semakin mengglobal dan dapat dijadikan sebagai ukuran perusahaan untuk menghasilkan suatu kinerja perusahaan yang lebih baik.

2.2.4. Tujuan Corporate Governance

Terdapat beberapa tujuan dalam penerapan *corporate governance*, sebagai berikut:

1. Mendorong tercapainya kesinambungan perusahaan melalui pengelolaan yang didasarkan pada asas transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi serta kesetaraan dan kewajaran.
2. Mendorong pemberdayaan fungsi dan kemandirian masing-masing organ perusahaan, yaitu Dewan Komisaris, Direksi dan Rapat Umum Pemegang Saham.
3. Mendorong pemegang saham, anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi agar dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakannya dilandasi oleh nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
4. Mendorong timbulnya kesadaran dan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat dan kelestarian lingkungan terutama di sekitar perusahaan.
5. Mengoptimalkan nilai perusahaan bagi pemegang saham dengan tetap memperhatikan pemangku kepentingan lainnya.
6. Meningkatkan daya saing perusahaan secara nasional maupun internasional, sehingga meningkatkan kepercayaan pasar yang dapat mendorong arus investasi dan pertumbuhan ekonomi nasional yang berkesinambungan.

2.2.5. Luas Pengungkapan *Corporate Governance* dalam Laporan Tahunan

Laporan tahunan merupakan sumber informasi paling penting mengenai gambaran perusahaan. Karena alasan tersebut menjadikan laporan tahunan sebagai sumber utama dalam melakukan penelitian mengenai *corporate governance*.

Berbagai macam gambaran informasi perusahaan termasuk praktek *corporate governance* ada di dalam laporan tahunan. Bhuiyan dan Biswas (2007) dalam Rini, (2010:17) berpendapat bahwa laporan tahunan harus dipertimbangkan sebagai sumber informasi paling penting mengenai perusahaan. Selain itu, Bushman dan Smith dalam Rini, (2010:17) berpendapat bahwa tujuan yang mendasari adanya penelitian mengenai *corporate governance* dalam akuntansi adalah untuk menyediakan bukti sejauh mana informasi yang diberikan dalam sistem akuntansi dapat mengurangi masalah keagenan.

Darrough dalam Rini (2010:14) mengemukakan bahwa ada dua jenis pengungkapan dalam hubungannya dengan persyaratan yang ditetapkan standar, yaitu:

1. Pengungkapan Wajib (Mandatory Disclosure)

Pengungkapan wajib merupakan pengungkapan minimum yang disyaratkan oleh standar akuntansi yang berlaku. Apabila perusahaan tidak bersedia untuk mengungkapkan informasi secara sukarela, pengungkapan wajib memaksa perusahaan untuk mengungkapkannya

2. Pengungkapan Sukarela (Voluntary Disclosure)

Pengungkapan sukarela merupakan butir-butir yang dilakukan secara sukarela oleh perusahaan tanpa diharuskan oleh peraturan yang berlaku. Hal ini dilakukan untuk menambah informasi yang diungkapkan perusahaan diluar batas minimum yang telah ditetapkan oleh peraturan. Salah satu cara meningkatkan kredibilitas perusahaan adalah melalui

pengungkapan sukarela secara lebih luas dan membantu investor dalam memahami strategi bisnis manajemen.

Bhuiyan dan Biswas (2007) Rini, (2010:18) mengidentifikasi sebanyak 45 item pengungkapan untuk mendeteksi adanya pengungkapan *corporate governance* di Bangladesh. Item-item tersebut diperoleh dari *Guidance on Good Practices in Corporate Governance Disclosure* yang dikeluarkan oleh United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD). Dalam UNCTAD, dibedakan menjadi dua bagian, yaitu pengungkapan informasi keuangan dan pengungkapan informasi non keuangan. Pengungkapan pada informasi keuangan terdiri dari sembilan item pengungkapan, sedangkan pengungkapan informasi non keuangan sejumlah 36 item pengungkapan.

Beberapa item pengungkapan yang dikeluarkan oleh UNCTAD tidak sesuai dengan keadaan perusahaan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan item-item pengungkapan berdasarkan keputusan ketua BAPEPAM dan Lembaga Keuangan Nomor KEP/134/BL/2006 Peraturan X.K.6. Penelitian ini juga menggunakan item-item yang diperoleh dari Pedoman Umum *Good Corporate Governance* Indonesia yang dikeluarkan oleh Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG), (Rini, 2010:18)

Terdapat 16 point item yang digunakan berdasarkan dari peraturan tersebut, yang terdiri dari pemegang saham, Dewan Komisaris, Dewan Direksi, Komite Audit, Komite Nominasi dan Remunerasi, Komite Manajemen resiko, Komite-komite lain yang dimiliki perusahaan, Sekretaris Perusahaan, Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Internal, Manajemen Resiko Perusahaan, Anggota

Dewan Direksi, dan anggota dewan komisaris; akses informasi dan data perusahaan; etika perusahaan; tanggung jawab sosial; pernyataan penerapan *corporate governance*; dan informasi penting lainnya yang berkaitan dengan penerapan *corporate governance*. Terdapat pembagian lagi dari 16 point tersebut di perinci dalam item-item berikut:

Tabel 2.2
Item-item dalam pengungkapan *corporate governance*

No	Klasifikasi	Item Pengungkapan
1	Pemegang Saham	<ol style="list-style-type: none"> 1. Uraian mengenai hak pemegang saham. 2. Pernyataan mengenai jaminan perlindungan hak atas pemegang saham perlakuan yang sama terhadap hak pemegang saham. 3. Tanggal pelaksanaan RUPS. 4. Hasil RUPS
2	Dewan Komisaris	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nama-nama anggota Dewan Komisaris. 2. Status setiap anggota (komisaris independen atau komisaris bukan independen). 3. Latar belakang pendidikan dan karier Dewan Komisaris. 4. Uraian mengenai tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris. 5. Kebijakan dan jumlah remunerasi anggota Dewan Komisaris. 6. Mekanisme dan kriteria penilaian sendiri tentang kinerja masing-masing anggota Dewan Komisaris. 7. Jumlah rapat yang dihadiri. 8. Jumlah kehadiran setiap anggota Dewan Komisaris dalam rapat. 9. Mekanisme pengambilan keputusan. 10. Program pelatihan Dewan Komisaris.
3	Direksi	<ol style="list-style-type: none"> 3. Nama-nama anggota Direksi dengan jabatan dan fungsinya masing-masing. 4. Uraian mengenai tugas dan tanggung jawab Direksi. 5. Latar belakang pendidikan dan karier anggota Direksi.

		<ol style="list-style-type: none"> 6. Ruang lingkup pekerjaan dan tanggung jawab masing-masing anggota Direksi. 7. Mekanisme pengambilan wewenang. 8. Mekanisme pendelegasian wewenang. 9. Kebijakan dan jumlah remunerasi anggota Direksi 10. Jumlah rapat yang dilakukan oleh Direksi 11. Jumlah kehadiran setiap anggota Direksi dalam rapat 12. Mekanisme dan kriteria penilaian terhadap kinerja anggota Direksi 13. Program pelatihan dalam rangka meningkatkan kompetensi Direksi
4	Komite Audit	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nama dan jabatan anggota Komite Audit. 2. Riwayat hidup singkat setiap anggota Komite Audit. 3. Uraian tugas dan tanggung jawab Komite Audit. 4. Jumlah kehadiran setiap anggota dalam rapat. 5. Jumlah pertemuan yang dilakukan oleh Komite Audit 6. Laporan singkat pelaksanaan kegiatan Komite Audit. 7. Independensi anggota Komite Audit. 8. Keberadaan piagam Komite Audit.
5	Komite Nominasi dan Remunerasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nama dan jabatan Komite Nominasi dan Remunerasi. 2. Riwayat hidup singkat anggota Komite Nominasi dan Remunerasi. 3. Uraian tugas dan tanggung jawab Komite Nominasi dan Remunerasi 4. Jumlah pertemuan yang dilakukan Komite Nominasi dan Remunerasi. 5. Jumlah kehadiran rapat anggota Komite Nominasi dan Remunerasi. 6. Laporan singkat pelaksanaan kegiatan Komite Nominasi dan Remunerasi. 7. Independensi anggota Komite Nominasi dan Remunerasi.
6	Komite Manajemen Risiko	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nama dan jabatan anggota Komite Manajemen Risiko. 2. Riwayat hidup singkat setiap anggota Komite Manajemen Risiko. 3. Uraian tugas dan tanggung jawab Komite Manajemen Risiko.

		<ol style="list-style-type: none"> 4. Jumlah pertemuan yang dilakukan oleh Komite Manajemen Risiko. 5. Jumlah kehadiran dalam setiap rapat. 6. Laporan singkat pelaksanaan kegiatan Komite Manajemen Risiko. 7. Independensi anggota Komite Manajemen Risiko.
7	Tanggung Jawab Sosial	<p>Karyawan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Uraian mengenai pengakuan hak-hak karyawan 2. Uraian mengenai persamaan kesempatan kepada seluruh karyawan 3. Uraian mengenai jaminan terciptanya lingkungan kerja yang kondusif 4. Komitmen perusahaan terhadap kesehatan dan keselamatan kerja 5. Manajemen keselamatan kerja <ul style="list-style-type: none"> • Keberadaan peraturan keselamatan kerja <p>Konsumen</p> <ol style="list-style-type: none"> 6. Deskripsi mengenai komitmen perusahaan terhadap perlindungan konsumen <p>Masyarakat</p> <ol style="list-style-type: none"> 7. Program kemitraan yang dilakukan oleh perusahaan (program kemitraan dan pembinaan usaha kecil) 8. Biaya yang dikeluarkan dalam program kemitraan 9. Bantuan korban bencana alam atau bantuan sosial lainnya 10. Bantuan pendidikan (beasiswa) dan pelatihan 11. Pengembangan sarana umum 12. Biaya yang dikeluarkan <ul style="list-style-type: none"> • Dialog dengan masyarakat <p>Lingkungan</p> <ol style="list-style-type: none"> 13. Komitmen perusahaan terhadap pelestarian lingkungan 14. Program pelestarian lingkungan yang dilakukan perusahaan
8	Komite-komite lain yang Dimiliki oleh Perusahaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nama dan jabatan anggota komite. 2. Riwayat hidup singkat setiap anggota komite. 3. Uraian tugas dan tanggung jawab komite. 4. Jumlah pertemuan yang dilakukan oleh komite.

		<ol style="list-style-type: none"> 5. Jumlah kehadiran setiap anggota dalam rapat. 6. Laporan singkat pelaksanaan kegiatan komite. 7. Independensi anggota komite.
9	Sekretaris Perusahaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nama Sekretaris Perusahaan. 2. Riwayat singkat Sekretaris Perusahaan. 3. Uraian mengenai tugas dan tanggung jawab Sekretaris Perusahaan.
10	Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Informasi tentang keberadaan SPI (Satuan Pengawas Internal). 2. Jumlah anggota SPI. 3. Jabatan masing-masing anggota SPI. 4. Uraian mengenai tugas dan tanggung jawab SPI. 5. Uraian mengenai aktivitas SPI selama setahun. 6. Penjelasan mengenai audit internal perusahaan.
11	Manajemen Resiko Perusahaan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penjelasan mengenai risiko-risiko yang dihadapi oleh perusahaan. 2. Upaya untuk mengelola risiko-risiko tersebut.
12	Perkara penting yang sedang dihadapi oleh perusahaan, anggota direksi dan anggota dewan komisaris.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pokok perkara/gugatan. 2. Posisi kasus. 3. Status penyelesaian perkara/gugatan. 4. Pengaruhnya terhadap kondisi keuangan perusahaan.
13	Akses informasi dan data perusahaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Uraian mengenai tersedianya akses informasi dan data perusahaan. 2. Daftar penyebaran informasi ke publik.
14	Etika Perusahaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pernyataan mengenai budaya perusahaan yang dimiliki perusahaan
15	Pernyataan Penerapan GCG	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keberadaan prinsip-prinsip GCG. 2. Keberadaan pedoman pelaksanaan GCG dalam perusahaan. 3. Kepatuhan terhadap pedoman GCG. 4. Keberadaan Board Manual. 5. Struktur tata kelola perusahaan. 6. Hasil penerapan GCG selama setahun. 7. Audit GCG (jasa atestasi) oleh eksternal auditor.
16	Informasi penting lainnya yang berkaitan dengan penerapan GCG	<ol style="list-style-type: none"> 1. Visi perusahaan. 2. Misi perusahaan. 3. Nilai-nilai perusahaan. 4. Kepemilikan saham oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi beserta anggota keluarganya dalam

		<p>perusahaan dan perusahaan lainnya.</p> <p>5. Uraian mengenai kepatuhan terhadap peraturan dan perundangan pasar modal.</p> <p>6. Uraian mengenai transaksi dengan pihak yang memiliki benturan kepentingan.</p> <p>7. Uraian mengenai etika bisnis dalam Perusahaan</p>
--	--	--

Sumber:

1. Keputusan Ketua BAPEPAM-LK No. KEP-134/BL/2006
2. Pedoman Umum *Corporate Governance* (KNKG, 2006)

2.2.6. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Luas Pengungkapan *Corporate Governance*

Penelitian kali ini faktor-faktor yang digunakan adalah 4 faktor yakni, ukuran perusahaan, profitabilitas, ukuran dewan komisaris, dan *leverage*. Dalam faktor-faktor tersebut dinilai memiliki pengaruh terhadap luas pengungkapan *corporate governance* pada perusahaan.

2.2.6.1. Ukuran Perusahaan

Besar atau kecilnya perusahaan merupakan cerminan dari ukuran perusahaan. Pada umumnya semakin besar perusahaan maka akan lebih lengkap informasi yang akan di ungkapkan dari pada perusahaan kecil. Ukuran perusahaan dapat di proksikan dengan aktiva, jumlah karyawan, kapitalisasi pasar, dan lain sebagainya. Pramono (2011) dalam Putratno, (2012). Singhvi dan Desai (1971) dalam Muhamad et al. (2009) mengungkapkan bahwa perusahaan dengan ukuran besar menggunakan informasi-informasi yang ada untuk tujuan

manajerial, khususnya untuk pengungkapan internal pengawasan oleh manajemen puncak.

Ukuran perusahaan akan mempengaruhi keputusan dalam pengambilan keputusan. Allah SWT berfirman dalam surat Al-Qamar ayat 49

إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ ﴿٤٩﴾

Artinya: “*Sesungguhnya Kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran*”. (QS. Al-Qamar: 49)

2.2.6.2. Profitabilitas

Profitabilitas sering sekali digunakan sebagai uji utama atas keefektivitasan operasi manajemen. Keiso, et al (2008:401). Profitabilitas suatu perusahaan akan mempengaruhi kebijakan para investor atas investasi yang dilakukan. *Profitabilitas* dapat diartikan sebagai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba pada periode tertentu. Kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba yang baik akan sangat disenangi oleh para investor dalam menanamkan saham. Namun berlaku dengan sebaliknya, kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba (*profit*) yang buruk tidak disukai oleh investor dalam menanamkan sahamnya. Sedangkan bagi perusahaan itu sendiri *profitabilitas* dapat digunakan sebagai evaluasi atas efektivitas pengelolaan badan usaha tersebut. Warsono dkk. 2009 dalam Natalia (2012:33).

perusahaan dengan *profitabilitas* lebih besar dibanding dengan yang lainnya memiliki kecenderungan untuk mengungkapkan lebih banyak informasi untuk mendukung kelangsungan posisi perusahaan tersebut.

Muhammad et al (2009). Pendapat Muhammad et al (2009) tersebut didukung oleh Singhvi dan Desai (1971) dalam Natalia (2012:34) dengan menyatakan pendapatan yang lebih besar memotivasi manajemen untuk menyediakan pengungkapan informasi yang lebih luas untuk memberikan jaminan kepada investor. Selain itu, *profitabilitas* perusahaan yang meningkat juga dapat berasal dari meningkatnya kapasitas perusahaan atau sumber pendanaan perusahaan dalam menjalankan aktivitas bisnis. Semakin bertambahnya sumber pendanaan yang didapat dari pemegang saham, kreditur, serta pemangku kepentingan lainnya, maka perusahaan akan semakin mempunyai kesempatan dalam mengembangkan aktivitas perusahaan sehingga perusahaan akan cenderung dapat meningkatkan labanya.

Meningkatnya laba dan pihak yang berkepentingan di dalam perusahaan mengakibatkan perusahaan harus memperluas pengungkapan informasi. Pengungkapan informasi ini digunakan sebagai respon tanggung jawab perusahaan atas penggunaan dana pemangku kepentingan.

Meningkatkan laba dalam pandangan Islam diperbolehkan. Diriwayatkan dalam sebuah hadist

عَنْ عُرْوَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَعْطَاهُ دِينَارًا يَشْتَرِي لَهُ بِهِ شَاةً فَاشْتَرَى لَهُ بِهِ شَاتَيْنِ فَبَاعَ إِحْدَاهُمَا بِدِينَارٍ وَجَاءَهُ بِدِينَارٍ وَشَاةٍ فَدَعَا لَهُ بِالْبَرَكَةِ فِي بَيْعِهِ وَكَانَ لَوْ اشْتَرَى التُّرَابَ لَرَبِحَ فِيهِ.

Dari Urwah al Bariqi, bahwasanya Rasulullah Shalallahu 'Alaihi wa Sallam memberinya satu dinar uang untuk membeli seekor kambing. Dengan uang satu

dinar tersebut, dia membeli dua ekor kambing dan kemudian menjual kembali seekor kambing seekor satu dinar. Selanjutnya dia datang menemui nabi Shalallahu 'Alaihi wa Sallam dengan membawa seekor kambing dan uang satu dinar. (Melihat hal ini) Rasulullah Shalallahu 'Alaihi wa Sallam mendoakan keberkahan pada perniagaan sahabat Urwah, sehingga seandainya ia membeli debu, niscaya ia mendapatkan laba darinya. (HR. Bukhari, no. 3443)

Pada kisah di atas dijelaskan sahabat mengambil keuntungan 100% dalam berniaga dan hal tersebut mendapatkan restu dari Nabi Muhammad, sehingga hal tersebut merupakan tindakan yang halal dalam Islam.

2.2.6.3. Ukuran Dewan Komisaris

Ukuran dewan komisaris merupakan jumlah anggota dewan komisaris yang dimiliki oleh perusahaan, terdiri dari komisaris utama, komisaris independen, dan komisaris. Kedudukan masing-masing anggota dewan komisaris, termasuk komisaris utama adalah setara. Jensen dan Mecking, (1976) dalam Putranto (2013:21) pada teori agensi, dewan komisaris dibutuhkan untuk memonitor dan mengendalikan tindakan manajer karena perilaku oportunistiknya. Dewan komisaris sebagai organ perusahaan bertugas dan bertanggungjawab untuk melakukan pengawasan dan memberi nasihat kepada dewan direksi serta memastikan bahwa perusahaan melaksanakan *good corporate governance* (KNKG, 2006). Akan tetapi, dewan komisaris tidak diperbolehkan untuk ikut serta dalam mengambil keputusan operasional. Coller dan Gregory dalam Hadi dan Sabeni, (2002) berpendapat bahwa semakin besar jumlah anggota dewan komisaris, maka akan semakin mudah untuk mengendalikan manajemen dan monitoring yang dilakukan akan semakin efektif.

2.2.6.4. *Leverage*

Jensen dan Meckling (1976) dalam Natalia (2012:35) mengungkapkan bahwa perusahaan dengan *leverage* yang tinggi cenderung mengungkapkan informasi lebih luas karena perusahaan dengan *leverage* yang tinggi mengakibatkan timbulnya biaya pengawasan yang lebih tinggi. Hal ini mengakibatkan perusahaan tersebut mengurangi biaya pengawasan dengan mengungkapkan informasi yang lebih luas untuk memenuhi kebutuhan kreditur-kreditur. Rasio *Leverage* menunjukkan kemampuan perusahaan atas proporsi penggunaan hutang dalam membiayai investasi (Natalia, 2012:35).

Banyak ukuran yang digunakan untuk mewakili tingkat *leverage* suatu perusahaan, yaitu *debt to asset*, *long term debt to total equity*, *debt to equity*, dan *debt service coverage*. Dalam penelitian ini, tingkat *leverage* yang digunakan adalah *debt to equity ratio*, yang menunjukkan seberapa besar total ekuitas yang dimiliki perusahaan yang berasal dari pembiayaan hutang (Endrian, 2010 dalam Natalia 2012:35).

Muamalah hutang-piutang merupakan *muamalah* yang diperbolehkan dalam Islam. Hutang-piutang didasarkan pada perintah saling tolong menolong dalam ketaqwaan dan kebaikan. Allah berfirman dalam surat al-Ma'idah ayat 2.

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ

شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya”.

(QS. Al-Maidah: 2)

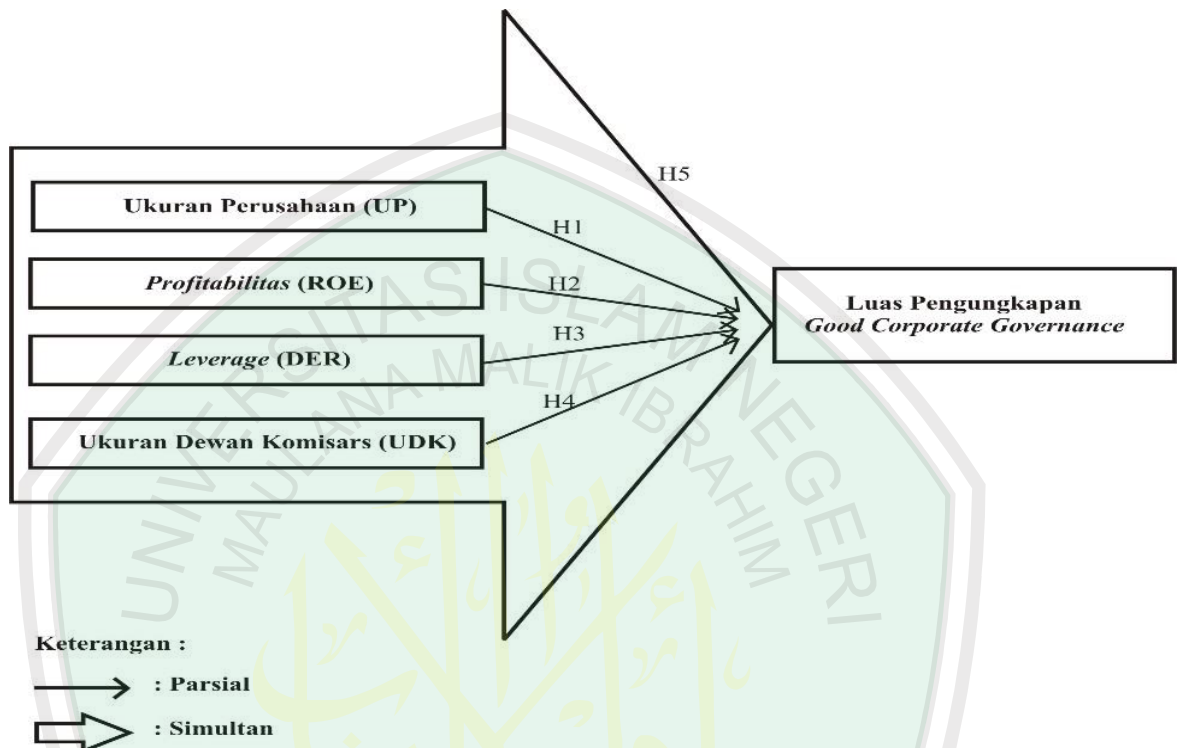
Meskipun hutang dalam Islam diperbolehkan, namun nabi menganjurkan berhati hati dalam berhutang karena hutang itu dapat mendatangkan kehinaan dan menjadi sebab seorang hamba masuk surga, bahkan bisa menjadi sebab masuk neraka.

2.3. Kerangka Berfikir

Kerangka berfikir pada penelitian ini berdasarkan pada peraturan BAPEPAM tahun 2006. BAPEPAM melalui keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: KEP-134/BL/2006 tentang kewajiban penyampaian laporan tahunan bagi emiten atau perusahaan publik. Variabel yang digunakan untuk menguji luas pengungkapan *corporate governance* sesuai peraturan BAPEPAM adalah *Profitabilitas*, *Ukuran Dewan Komisaris*, *Leverage*, dan *Ukuran Perusahaan*. Lebih mudah pemahaman dapat dilihat di gambar 2.1 berikut.

Gambar 2.1

Kerangka Berfikir



2.4. Hipotesis Penelitian

2.4.1. Pengaruh antara Ukuran Perusahaan terhadap luas pengungkapan *corporate governance*.

Ukuran perusahaan merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi luas pengungkapan *corporate governance*, karena semakin besar perusahaan maka manajemen mempunyai kewajiban untuk memberikan informasi yang lebih dan handal. Hal ini dilakukan sebagai wujud tanggung jawab manajemen kepada para pemangku kepentingan seperti investor, kreditor, yang sangat membutuhkan informasi dalam pengambilan keputusan. Perusahaan besar akan mengungkapkan informasi yang lebih banyak dalam upaya mengurangi

biaya keagenan (Hikmah, 2011). Perusahaan kecil cenderung untuk menyembunyikan informasi penting dikarenakan *competitive disadvantage* (Almilia, 2008:120 dalam Putranto, 2013:20).

Ada beberapa penelitian terdahulu terkait dengan luas pengungkapan *corporate governance* yang menggunakan variabel ukuran perusahaan menghasilkan hasil yang cukup konsisten terhadap luas pengungkapan, misalnya: Bhuiyan dan Biswas (2007), Rahmawati, Mutmainah, dan Haryanto (2007), Rini (2010), Hikmah, dkk (2011), Riani (2012), Ardian (2013). Berdasarkan beberapa penelitian tersebut mendapatkan hasil bahwa ukuran perusahaan berpengaruh pada luas pengungkapan *corporate governance*.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:

H1 : Ukuran Perusahaan memiliki pengaruh terhadap luas pengungkapan *corporate governance*.

2.4.2. Pengaruh antara Profitabilitas terhadap luas pengungkapan *corporate governance*.

Profitabilitas suatu perusahaan menunjukkan kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu pada tingkat penjualan, asset dan modal saham tertentu. Menurut Muhamad et al. (2009) menyatakan bahwa perusahaan dengan *profitabilitas* yang tinggi lebih cenderung mengungkapkan lebih banyak informasi. Informasi ini digunakan untuk mendukung kelangsungan posisi perusahaan tersebut.

Meningkatnya *profitabilitas* suatu perusahaan dapat disebabkan oleh meningkatnya kapasitas perusahaan atau sumber pendanaan dalam menjalankan aktivitas bisnis. Peningkatan kapasitas perusahaan atau sumber pendanaan akan berjalan lurus dengan meningkatnya jumlah pemangku kepentingan dengan modal yang mereka tanamkan dalam perusahaan.

Bertambahnya jumlah pemangku kepentingan dalam perusahaan akan menuntut manajemen untuk mengungkapkan *corporate governance* sebagai wujud tanggung jawab atas penggunaan modal dari pemangku kepentingan oleh perusahaan. Laporan *corporate governance* dengan kualitas yang tinggi, akan membuat yakin para pemangku kepentingan dengan bertambahnya *profitabilitas* perusahaan akan memberikan pengaruh positif (bertambah) pada kekayaan pemangku kepentingan. Penelitian yang dilakukan oleh Nurkhin (2009) menunjukkan *profitabilitas* berpengaruh terhadap luas pengungkapan *corporate governance*.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:

H2 : Profitabilitas memiliki pengaruh terhadap luas pengungkapan *corporate governance*.

2.4.3. Pengaruh antara Ukuran Dewan Komisaris terhadap luas pengungkapan *corporate governance*.

Dewan komisaris memiliki wewenang dan tanggung jawab secara keseluruhan dalam melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi serta memastikan bahwa perusahaan melaksanakan *corporate governance*

selama kinerja perusahaan, namun dewan direksi tidak diperbolehkan ikut mengambil keputusan dalam kegiatan operasional. Jensen dan Meckling (1976) dalam Putranto (2013:21) menyatakan bahwa dewan komisaris dibutuhkan untuk memonitor dan mengendalikan tindakan manajemen karena perilaku oportunistanya. Coller dan Gregory (1999) dalam Sembiring (2005) menyatakan bahwa semakin besar jumlah anggota dewan komisaris, maka akan semakin mudah untuk mengendalikan dan mengawasi kinerja manajer secara efektif.

Coller dan Gregory (1999) dalam Sembiring (2005) menyatakan bahwa semakin besar jumlah anggota dewan komisaris, maka akan semakin mudah untuk mengendalikan CEO dan monitoring yang dilakukan akan semakin efektif. Dikaitkan dengan pengungkapan *corporate governance*, maka dengan adanya tekanan terhadap manajemen, pengungkapan *corporate governance* akan semakin luas.

Terdapat Beberapa penelitian terdahulu yang menggunakan variabel ukuran dewan komisaris dalam penelitiannya. Ukuran dewan komisaris berpengaruh terhadap luas pengungkapan *corporate governance*. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil penelitian seperti, Hikmah (2011), Rikafitri (2011), Ardian (2012) dan Putranto (2013).

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:

H3 : Ukuran Dewan Komisaris memiliki pengaruh terhadap luas pengungkapan *corporate governance*.

2.4.4. Pengaruh antara *Leverage* terhadap luas pengungkapan *corporate governance*.

Muhamad et al. (2009) menyebutkan bahwa perusahaan dengan tingkat *leverage* yang tinggi mempunyai kewajiban yang lebih tinggi untuk mengungkapkan informasi, khususnya informasi keuangan dalam rangka untuk meyakinkan kreditur jangka panjang perusahaan bahwa perusahaan mempunyai sumber daya yang cukup untuk membiayai aktivitas bisnis perusahaan. Hal tersebut dilakukan oleh perusahaan karena untuk mengurangi tingginya biaya pengawasan (*monitoring costs*) (Alijifri dan Hussainey, 2007 dalam Natalia, 2012:35). Dengan luas informasi yang diungkapkan tersebut, maka perusahaan tidak perlu mengeluarkan biaya yang tinggi untuk memenuhi informasi yang dibutuhkan kreditur.

Penelitian terdahulu yang dilakukan Retno (2012) menunjukkan bahwa *leverage* memiliki pengaruh terhadap luas pengungkapan *corporate governance*. Penelitian tersebut dapat mendukung pernyataan dari Muhamad et al. (2009).

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:

H4 : Tingkat *Leverage* memiliki pengaruh terhadap luas pengungkapan *corporate governance*.

2.4.5. Pengaruh antara Ukuran Perusahaan, Ukuran Dewan Komisaris, Profitabilitas, Dan *Leverage* pada luas pengungkapan *corporate governance*

Berdasarkan pada hipotesis-hipotesis di atas dan berdasarkan pada penelitian terdahulu terhadap variabel Ukuran Perusahaan, Ukuran Dewan Komisaris, Profitabilitas, Dan *Leverage*, maka dapat di tarik sebuah hipotesis sebagai berikut:

H5 : Ukuran Perusahaan, Ukuran Dewan Komisaris, Profitabilitas, Dan *Leverage* memiliki pengaruh secara bersama-sama terhadap luas pengungkapan *corporate governance*.